

ABSTRAK

PELAKSANAAN PEMBIAYAAN IJARAH MUNTAHIYA BITTAMLIK (Studi Pada Bank Syariah Mandiri KCP Bandar Lampung Kedaton)

Oleh:

ADI KURNIAWAN

Bank syariah mempunyai berbagai bentuk pembiayaan yang ditawarkan, salah satunya adalah pembiayaan *Ijarah muntahiya Bittamlik* (IMBT). Pembiayaan *Ijarah Muntahiya Bittamlik* merupakan sebuah transaksi *ijarah* yang diikuti dengan proses pemindahan hak kepemilikan atas barang itu sendiri atau sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak pada awal akad. Keberadaan bentuk pembiayaan ini sudah sangat lama bahkan sejak munculnya bank syariah di Indonesia. Pokok bahasan dalam penelitian ini mengenai syarat dan prosedur pembiayaan IMBT, akibat hukum yang timbul dalam pembiayaan IMBT, serta pelaksanaan akad pembiayaan IMBT pada Bank Syariah Mandiri KCP Bandar Lampung Kedaton.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah menggunakan pendekatan normatif-terapan. Data dan sumber data diperoleh dari data primer dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data menggunakan studi pustaka, studi dokumen dan wawancara. Metode pengolahan data dilakukan dengan cara identifikasi data dan penyusunan data, yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat dinyatakan bahwa dalam pelaksanaan pembiayaan IMBT syarat dan prosedur yang harus dipenuhi memiliki kesamaan dengan pembiayaan syariah yang lainnya. Apabila ada salah satu syarat maupun prosedur yang tidak terpenuhi atau dilaksanakan, maka proses pelaksanaan pembiayaan *ijarah muntahiya bittamlik* tidak dapat dilanjutkan atau batal demi hukum. Pelaksanaan pembiayaan IMBT pada Bank Syariah Mandiri KCP Bandar Lampung Kedaton telah sesuai serta dilaksanakan dengan merujuk kepada peraturan perundang-undangan yang terkait, dalam hal ini adalah Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor: 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Ijarah* dan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor: 27/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Al-Ijarah Al-Muntahiyah Bi Al-Tamlik*. Akibat hukum yang timbul dalam pembiayaan IMBT adalah pemenuhan hak dan kewajiban oleh kedua belah pihak yang terikat. Berdasarkan atas akibat hukum yang timbul berupa pemenuhan hak dan kewajiban para pihak, maka penulis berpendapat bahwa pembiayaan *ijarah muntahiya bittamlik* tersebut seimbang dan telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang

mengaturnya, dalam hal ini adalah UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor: 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Ijarah*, serta Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor: 27/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Al-Ijarah Al-Muntahiyah Bi Al-Tamlik*.

Kata Kunci: Akad *Ijarah Muntahiya Bittamlik*, *Mua'jir*, *Musta'jir*, Bank Syariah

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF IJARAH MUNTAHIYA BITTAMLIK FINANCING (Study On Bank Syariah Mandiri KCP Bandar Lampung Kedaton)

By:

ADI KURNIAWAN

Islamic banks have various forms of financing offered, one of the forms of financing is financing the *Ijarah Muntahiya Bittamlik* (IMBT). *Ijarah Muntahiya Bittamlik* is an *ijarah* transaction followed by a process of ownership rights to the goods themselves or in accordance with the agreement of the two parties at the beginning of the contract. The existence of this form of financing has been very long even since the emergence of Islamic banks in Indonesia. The subject of this research is the terms and procedures of *Ijarah Muntahiya Bittamlik* financing, legal consequences arising in the financing of *Ijarah Muntahiya Bittamlik*, and the implementation of the *Ijarah Muntahiya Bittamlik* financing contract at Bank Syariah Mandiri KCP Bandar Lampung Kedaton.

The type of research used is normative-applied legal research with descriptive research type. The problem approach uses a normative-applied approach. Data and sources of data obtained from primary data and secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Data collection uses library studies, document studies and interviews. Data processing methods are done by identifying data and compiling data, which are then analyzed qualitatively.

Based on the results of research and discussion, it can be stated that in the implementation of IMBT financing, the requirements and procedures that must be met have similarities with other sharia financing. If there are any conditions or procedures that are not fulfilled or implemented, the process of implementing *ijarah muntahiya bittamlik* financing cannot be continued or null and void by law. The implementation of IMBT financing at Bank Syariah Mandiri KCP Bandar Lampung Kedaton has been appropriate and carried out by referring to the relevant laws and regulations, in this case the National Sharia Council Fatwa Number: 09 / DSN-MUI / IV / 2000 Concerning *Ijarah* Financing and National Sharia Council Fatwa Number: 27 / DSN-MUI / III / 2002 concerning *Al-Ijarah Al-Muntahiyah Bi Al-*

Tamlik. The legal consequences arising from IMBT financing are the fulfillment of rights and obligations by both bound parties. Based on the legal consequences arising in the form of fulfilling the rights and obligations of the parties, the authors argue that the financing of *ijarah muntahiya bittamlik* is balanced and in accordance with the provisions that govern it, in this case Law No. 21 of 2008 concerning Sharia Banking, National Sharia Council Fatwa Number: 09 / DSN-MUI / IV / 2000 Concerning *Ijarah Financing*, and National Shari'ah Council Fatwa Number: 27 / DSN-MUI / III / 2002 About *Al-Ijarah Al-Muntahiyah Bi Al-Tamlik*.

Keywords: **Financing Agreement of *Ijarah Muntahiya Bittamlik*, *Mua'jir*, *Musta'jir*, Islamic Bank.**